

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA KORUPSI DI KOTA PALOPO**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

AUFALDY SHAHAB

10400114162

**JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aufaldy Shahab

NIM : 10400114162

Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 14 Mei 199

Jur/Prodi/KonsentrasI : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Fakultas/Program : Syari`ah dan Hukum

Alamat : BTN Libukang Permai Blok A/25

Judul : “Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Di kota Palopo”

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Gowa, 17 Februari 2021

Penyusun

Aufaldy Shahab

NIM.10400114162

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “**Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Di kota Palopo**” yang ditulis Oleh, Nama: Aufaldy Sahahab, NIM: 10400114162, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan Pada 17 Februari 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 17 Februari 2021

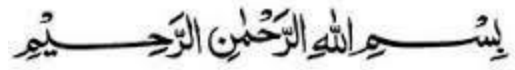
DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|--|--|
| Ketua | : Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag | (..... ) |
| | : Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd | (..... ) |
| Munaqisy I | : Dr. Marilang, S.H., M.Hum. | (..... ) |
| Munaqisy II | : Dr. Ashar Sinilele, S.H., M.H. | (..... ) |
| Pembimbing I | : Ahkam Jayadi, S.H., M.H. | (..... ) |
| Pembimbing II | : Abd. Rais Asmar, S.H., M.H | (..... ) |

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Alauddin Makassar


Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, L.c., M.Ag
NIP: 19731122 200012 1 0

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat, kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Intelijen Kejaksaan dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi di Kota Palopo”**. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala pengorbanan, kesabaran, doa, dukungan, dan bantuan semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menyelesaikan skripsi ini yang tak ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sahabuddin S.Pd dan Ibunda Dra. Juniasmi, serta saudara-saudara saya Auliah Sasmi Shahab dan Aghita Putri Shahab serta keluarga besar untuk seluruh pengorbanan, dukungan, motivasi serta doa yang tak henti-hentinya diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, ph. D beserta jajaran-jajarannya yang telah menyediakan fasilitas belajar sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dengan baik selama ini.
3. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
5. Bapak Ahkam Jayadi, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Abd. Rais Asmar, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Marilang, S.H., M.Hum. selaku penguji I dan Bapak Ashar Sinilele, S.H., M.H. Yang telah menguji dengan penuh kesungguhan untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Para dosen dan beserta staff jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis selama masa pendidikan.
8. Kepada Tim Kejaksaan Kota Palopo yang telah memberikan kesempatan dan informasi untuk penyusunan skripsi kepada penulis selama melakukan penelitian. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaannya. Namun besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho dan berkah dalam setiap langkah yang kita ambil kedepannya. Sekali lagi, saya ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak

Makassar, 10 Februari 2021

Penulis



Aufaldy Shahab

NIM : 10400114162

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------------|
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| ABSTRAK..... | xv |
| BAB I..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| E. Kajian Pustaka..... | 6 |
| BAB II..... | 8 |
| A. Intel/Intelijen..... | 8 |
| B. Kejaksaaan..... | 12 |
| C. Tindak Pidana..... | 18 |
| D. Tindak Pidana Korupsi..... | 27 |
| BAB III..... | 37 |
| A. Lokasi dan Jenis Penelitian..... | 37 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 37 |
| C. Sumber Data..... | 37 |
| D. Metode Pengumpulan Data..... | 38 |
| E. Instrumen Penelitian..... | 39 |
| F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data..... | 39 |
| G. Pengujian Keabsahan Data..... | 40 |

| | |
|--|----|
| BAB IV..... | 41 |
| A. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Palopo..... | 41 |
| B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi..... | 54 |
| BAB V..... | 58 |
| A. Kesimpulan..... | 58 |
| B. Saran..... | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 60 |



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik dibawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ط | Ta | ﺕ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ﺯ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | hamzah | , | Apostof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan

tanda ().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ا | <i>fathah</i> | A | A |
| إ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| أ | <i>ḍammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اي | <i>fathah</i> dan yā' | Ai | a dan i |
| او | <i>fathah</i> dan wau | Au | a dan u |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|
| اَ اِ اُ ... اَ اِ اُ ... | <i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| اِ | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | I | i dan garis di atas |
| اُ | <i>ḍammah</i> dan <i>wau</i> | Ū | u dan garis di atas |

4. Tā' Marbū'ah

Transliterasi untuk *tā' marbū'ah* ada dua, yaitu: *tā' marbū'ah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbū'ah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbū'ah* itu transliterasinya dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda *tasydid* ّ (), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ّber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafẓ al-Jalālah (جلال)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.

Adapun *tā' marbū'ah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ *al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.



ABSTRAK

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan juga harus terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, mengamankan pelaksanaan pembangunan serta melindungi kepentingan masyarakat. Sebagai contoh adanya kasus dugaan korupsi terhadap pembangunan Proyek Jalan Lingkar Barat (JLB) di Kota Palopo yang dibangun untuk menjadi penghubung antara Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan. Hasil informasi yang telah didapatkan yaitu Kejaksaan Negeri Palopo telah berhasil menetapkan tiga tersangka dan masih mengusut tersangka-tersebut lainnya. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana peran Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan kendalanya dengan menggunakan metode Yuridis Empiris dan berlokasi di Kantor Kejaksaan Negeri Palopo Sulawesi Selatan.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum *Recht* (Belanda), *Law* (Inggris) adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya; Sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat atau berbangsa; Undang-undang, ordonasi, atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditandatangani kedalam undang-undang.¹

Pemberlakuan Hukum pidana pada masa colonial Belanda yang pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan peralihan pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Semual lembaga negara tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini. Peralihan menjadi: Semua lembaga Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.² Ketentuan tersebutlah yang kemudian

¹Zulkifli & Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary of Law*, (Cetakan I ; Surabaya: Grahamedia Press, 2012), h. 199.

²Penjelasan Aturan Peralihan UUD 1945, *Rumusan Perubahan: ATURAN PERALIHAN pasal I, II, III, IV, menjadi I, II, III.*

menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang- undangan pada masa colonial pada masa kemerdekaan.

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa colonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang kemudian dikenal dengan nama kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meski demikian, dalam pasal XVII UU Nomor 2 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: “Undang-Undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden. Dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura.

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesiadan mengubah kitab Undang-Undang hukum pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1958 yang berbunyi; “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia”. Jadi, pertanggal 1 Januari 2013, KUHP tersebut sudah berlaku selama 95 tahun.³

Eksistensi perkara pidana lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Perkara pidana selalu muncul manakala ada proses pidana. Adapun tindak pidana atau kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia.Segala aktivitas manusia baik aktivitas politik, sosial, dan ekonomi.Dapat menjadi kausa terjadinya kejahatan (tindak pidana).Jelas dirasakan bahwa kejahatan (tindak pidana) marak ada dan berada di segala lini kehidupan.Sering terjadi di lingkungan keluarga, kelompok,

masyarakat, aparat pemerintah, bangsa atau negara dan bahkan berdimensi internasional (transnational crime).Sepanjang ada kehidupan dipastikan muncul kejahatan/tindak pidana dan karena itu pula terjadi perkara pidana.⁴

Menurut Bernes dan Teerers kejahatan (kriminalitas) akan selalu hadir dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan dan tidak ada kejahatan tanpa masyarakat.Begitu pula dengan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh suatu masyarakat tertentu atau Negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia.⁵

Upaya menanggulangi kejahatan pada hakikatnya sangat erat kaitannya dengan kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang dikenal dengan istilah politik kriminal. Marc Ancel merumuskan pengertian politik kriminal dengan kalimat

yang terjemahannya sebagai berikut: Organisasi yang rasional untuk mengontrol kejahatan yang terjadi di masyarakat atau organisasi yang rasional sebagai respons sosial terhadap kejahatan.⁶Oleh karena itu, pada masa kini masyarakat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap lembaga pengadilan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

³Prayudi Guse, *Panduan Lengkap Hukum Pidana & Perdata*, hlm, 6.

⁴Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, (Cetakan ke-1; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 1.

⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*

Kejaksaan juga harus terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan mengembangkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Untuk itu, pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁷

Sebagai contoh adanya kasus dugaan korupsi terhadap pembangunan proyek Jalan Lingkar Barat (JLB) Di Kota Palopo yang dibangun untuk menjadi penghubung antara Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara. Anggaran pembangunan proyek ini berasal dari APBD Perubahan tahun 2016 senilai Rp 5 Miliar. Proyek tersebut sempat dihentikan karena tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Proyek tersebut mulai bermasalah pada awal tahun 2017 sehingga pihak kejaksaan mulai melakukan penyelidikan pada tanggal 8 September 2017 untuk mengetahui adanya insikasi korupsi pada pengerjaan proyek jalan yang menggeruk gunung tersebut.

⁶Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), h. 7.

⁷Undang-Undang Kejaksaan, UU RI Nomor 16 Tahun 2004, (Cetakan Pertama; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. v.

Dalam melakukan penyelidikan Kejaksaan Negeri Palopo menghadirkan puluhan saksi ahli yang berasal dari Universitas Hasanuddin dan audit BPKP Sulawesi Selatan. Pada waktu itu tim ahli melakukan dua kali pemantauan visual proyek yang telah dihentikan pengerjaannya itu. Hasil penyelidikan membuat pihak Kejari menyurat ke BPKP untuk melaksanakan audit dugaan kerugian Negara dalam proses pengerjaan proyek tersebut. Sehingga pada 15 Maret 2018 audit BPKP pun keluar dan menetapkan kerugian Negara dari proyek itu senilai Rp 1,3 Miliar. Sampai saat ini Kejaksaan Negeri Palopo sudah menetapkan tiga tersangka dan sudah ditahan oleh Kejari Palopo, serta masih mengusut tersangka-tersebut yang kemungkinan masih terlibat.

Dari latar belakang di ataslah sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Peranan Intelejen Kejaksaan Negeri Palopo dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kota Palopo.”

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tugas dan tanggung jawab Intelejen Kejaksaan Negeri Palopo dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kota Palopo ?
- b. Faktor – faktor apakah yang menghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Intelejen Kejaksaan Negeri Palopo dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Kota Palopo

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana tugas dan tanggung jawab Intelejen Kejaksaan Negeri Palopo dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kota Palopo .
- b. Untuk mengetahui Faktor – faktor apakah yang menghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Intelejen Kejaksaan Negeri Palopo dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Kota Palopo.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Dari segi ilmiah diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat memperluas wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.
- b. Kegunaan praktis yaitu bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan para penegak hukum dalam hal ini Intelejen Kejaksaan Negeri Palopo dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di Kota Palopo.

E. Kajian Pustaka

Upaya penelusuran berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini telah penulis lakukan. Tujuan pengkajian pustaka ini antara lain agar fokus penelitian tidak merupakan pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi lain yang signifikan untuk diteliti dan dikembangkan.

1. Karya Ilmiah

Risky Nur Amalia(B11112018),dalam skripsinya yang berjudul

“Peranan Intelejen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan Negeri Makassar)”, 2016. Pokok kajian dalam penelitian ini ialah Intelejen melakukan kegiatan penyidikan dengan mencari dan mengumpulkan data atau keterangan tentang benar atau tidaknya tindak pidana korupsi, selain itu saksi intelejen juga berperan sebagai tim pengawal dan pengawas pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) berdasarkan intruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

⁸Risky Nur Amalia. *“Peranan Intelejen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan Negeri Makassar)”* (Skripsi, Fakultas Hukum UNHAS Makassar, 2011).

Adapun hambatan dalam penyelidikan ini yaitu minimnya sumber daya manusia yang dimiliki saksi intelejen serta terbatasnya anggaran dana yang diberikan kepada kejaksaan, sementara banyak tugas yang harus diselesaikan oleh seksi intelejen yang memerlukan dana lebih banyak.⁸

- a Agus Susanto(E0008274),dalam tesisnya yang berjudul “*Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi 2011 di Kejaksaan Negeri Karanganyar*”, 2013. Pokok kajian dalam penelitian ini menjelaskan Intelijen kejaksaan berperan dalam penyelidikan dalam bentuk operasi intelejen yudisial, yaitu dengan pengumpulan data dan bahan keterangan yang nantinya dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap penyelidikan yang ditangani oleh kepala seksi pidana khusus.⁹

Dari beberapa karya ilmiah yang telah dikemukakan di atas, jelas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.Namun dalam proposal ini, penulis lebih menekankan pada Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kota Palopo.

⁹Agus Susanto, “*Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi 2011 di Kejaksaan Negeri Karanganyar*”, (Skripsi; Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013).

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

1. Pengertian Intelijen

Dalam kamus Bahasa Indonesia pengertian Intelijen adalah orang yang mencari keterangan (mengamat-amat) seseorang, atau dinas rahasia.¹⁰ Sedangkan dalam Kamus Hukum bahwa: “Intelijen merupakan kegiatan mata-mata atau spionase yang dilakukan suatu negara untuk memperoleh data rahasia negara mengenai informasi di bidang militer, teknologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga peta kekuatan atau aktivitas dan rencana musuh dapat diketahui. Sebaliknya, kontra-intelijen berusaha untuk menemukan agen-agen spionase yang menjalankan kegiatan mata-mata untuk negara lain”.¹¹

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Pasal 1 butir 1 Tentang Intelijen Negara bahwa:

“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional”.

Istilah “intelijen” berasal dari kata “intelegensia” yang artinya adalah “kecerdasan”, ini memberikan makna bahwa pekerjaan Intelijen memerlukan

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Wacana Intektual, 2007). hlm.218-219.

kecerdasan. Namun demikian ada juga yang mengartikan bahwa kata Intelijen berarti “informasi”. Terdapat definisi Intelijen yang lain, yaitu pengetahuan tentang informasi yang harus dipenuhi oleh pejabat pemerintahan, baik sipil maupun militer yang dapat bekerja dalam menjamin keamanan Nasional.¹²

Dari sisi pengertian, Intelijen terbagi menjadi dua tingkatan. Pertama, makna yang umum ialah mencakup kemampuan mempelajari dan memanfaatkan eksperimen dan beraksi secara cepat terhadap situasi. Kedua, makna yang khusus (secara profesi) ialah tugas dan kewajiban-kewajibannya telah terbatas secara jelas karena intelijen merupakan suatu bentuk operasi atau aktivitas. Artinya, usaha yang terorganisasi untuk menghimpun informasi dan menilainya satu per satu, kemudian menghimpunnya hingga terbentuk gambaran yang lebih besar dan lebih jelas, sampai pada kemungkinan dapat memandang segala sesuatu yang akan terjadi. Dengan kata lain intelijen adalah aktivitas yang berkesinambungan guna menerobos kabut yang menyelimuti sehingga kita dapat menggambarkan langkah-langkah untuk hari esok. Dalam hal ini intelijen dalam suatu negara dimaknai dalam tiga penampilannya, yaitu penampilan sebagai organisasi (organization), penampilan sebagai aktivitas (activity), dan penampilan sebagai suatu pengetahuan (knowledge). Ketiga penampilan tersebut dapat di utaikan sebagai berikut:

a. Intelijen sebagai suatu organisasi (organization)

Sifat keberadaan intelijen merupakan organisasi dinas rahasia, dalam pengertian di bawah suatu permukaan dan sulit dilihat dengan mata biasa, tersembunyi dari pengamatan public, bagaikan kapal selam.

¹² Y. Wahyu Saronto, Intelijen (teori intelijan dan pembangunan jaringan), (Jogjakarta: CV Andi Offset, 2018). Hlm.7

b. Intelijen sebagai aktivitas (activity)

Berarti suatu aktivitas tertutup, Aktivitas itu mencakup kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin dan operasi-operasi intelijen yang bersifat temporer dan dibatasi waktu. Gentuk aktivitas intelijen dilakukan pada tiga pilar utama yaitu, penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

c. Intelijen sebagai pengetahuan (knowledge)

Suatu pengetahuan yang spesifik, suatu *fore-knowledge* intelijen mengetahui hal-hal yang akan terjadi mendahului orang lain dalam bentuk produk intelijen. Dengan demikian produk intelijen pemerintah dapat mengantisipasi setiap kemungkinan adanya ancaman (to make better anticipation) mengambil langkah-langkah strategis (to get better strategic) dan membuat kebijakan perencanaan nasional yang lebih baik (to get better planning).¹³

2. Peran, Tujuan, Fungsi, dan Ruang Lingkup Intelijen

a. Peran Intelijen

Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul, dan mengancam kepentingan, dan keamanan nasional suatu negara. Peran tersebut dilakukan intelijen dengan cara mengolah data yang didapatkan menjadi informasi intelijen, informasi intelijen merupakan informasi yang bersifat deteksi terhadap ancaman, informasi tersebut berguna sebagai peringatan dini terhadap pengguna untuk mengambil langkah/tindakan untuk mencegah dan mengatasi ancaman tersebut.¹⁴

¹³ Y. Wahyu Saronto, Intelijen (Teori Intelijan dan Pembangunan Jaringan), (Jogjakarta; CV Andi Offset, 2018). , hlm 9-10

b. Tujuan Intelijen

Tujuan intelijen negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

c. Fungsi Intelijen

- 1) Intelijen negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- 2) Penyelidikan sebagaimana di bahas pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- 3) Pengamanan sebagai mana dimaksud ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.
- 4) Penggalangan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.
- 5) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia.

¹⁴ Stanislaus Riyanta, “Peran Intelijen dalam Pencegahan, Pengamanan dan Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Intelijen. Net*, 28 Desember 2015.

d. Ruang Lingkup

Dalam Pasal 7 Undang-undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen menyebutkan ruang lingkup intelijen Negara meliputi :¹⁵

- a) Intelijen dalam negeri dan luar negeri
- b) Intelijen pertahanan dan/atau militer
- c) Intelijen kepolisian
- d) Intelijen penegakan hukum
- e) Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

B. Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹⁶

Pengertian Kejaksaan terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

¹⁵ Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”

Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:¹⁷

- a. Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan.
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

¹⁶ Dikutip dari www.kejaksaan.go.id. Diakses pada 22 desember 2018

- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- 2) Pengamanan kebijakan penegakkan hukum.
- 3) Pengawasan peredaran barang cetakan.
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal.

Disamping itu, kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti di atur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu :

- Pasal 31 : “Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.”

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

- Pasal 32 : “Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini”
- Pasal 33 : “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.
- Pasal 34 : “Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya”.

Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin lembaga kejaksaan, yaitu:

Pasal 35 :

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁸ C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana* (Bandung, Nuansa Aulia, 2018), hlm. 109-112

Selain tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :¹

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1)).
- b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua (Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b).
- c. Mengadakan penuntutan (Pasal 14 huruf b).
- d. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2)), melakukan penahanan dan penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat (2)), melakukan penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2)), melakukan penahanan kota (Pasal 22 ayat (3)), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23).
- e. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan pengangguhan penahanan serta dapat mencabut penagguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang telah ditentukan (Pasal 31).
- f. Mengadaan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak memungkinkan untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1)).
- g. Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4)), mengawasi hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka tanpa mendengar pembicaraan (Pasal 71 ayat (1)).

- h. Meminta dilakukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80).
- i. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139).
- j. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum (Pasal 14 huruf i).
- k. Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikan penuntutan dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 ayat (2) huruf d).
- l. Mengadakan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan (Pasal 141).
- m. Mengadakan pemecahan penuntutan (*splitsing*) terhadap satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 42).
- n. Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan disertai surat dakwaan beserta berkas perkara (Pasal 143 ayat (1)).
- o. Membuat surat dakwaan (Pasal 143 ayat (2)).
- p. Untuk maksud penyempurnaan atau tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

3. Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Tertentu

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa wewenang Jaksa adalah bertindak sebagai Penuntut Umum dan sebagai eksekutor. Namun Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan Kejaksaan ini contohnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Misalnya dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi yang menegaskan bahwa: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan dalam undang-undang.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.

Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁹

Strafbaar feit merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yang berarti delik. *Strafbaarfeit* terdiri atas 3 suku kata, yaitu *straff*, *baar*, *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :²⁰

- Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,
- Baar diartikan sebagai dapat dan boleh,

- Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 3 Th. 1999), dan perundang-undangan lainnya.²¹ Beberapa pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut para ahli hukum, antara lain:

Simons merumuskan bahwa strafbaar feit adalah tindakan yang menurut undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Simons juga merumuskan bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum.²²

Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana karena melakukan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2007). Hlm.47.

²⁰ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rangka Education; Yogyakarta, 2012) hlm.19.

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Rajawali Pers). Hlm 124.

Sementara itu Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²³

Istilah tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia sama dengan istilah yang digunakan di Belanda oleh karena KUHP Indonesia bersumber dari *Wetboek Van Strafrecht (WvS)* Belanda. Di Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah tersebut tidak hanya meliputi segala hal tentang perbuatan (*handelen*), tetapi juga tentang pengabaian (*nalaten*). *Strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang memiliki hubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh suatu perbuatan, kemudian mengandung akibat dari perbuatan tersebut yang meresahkan dan mengancam ketertiban di masyarakat.²⁵ Ditinjau dari Asas Legalitas yang dalam bahasa asing dirumuskan dengan *Nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*,²⁶ yang dalam bahasa Indonesia dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2007). Hlm.47.

²³ Adami Chazawi, *Op. cit*, Hlm 124.

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2014) hlm. 95-96.

Tiada suatu perbuatan dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan tersebut.

Ada dua hal yang dapat ditarik dan dijadikan sebagai kesimpulan berdasarkan rumusan tersebut :²⁷

- 1) Jika suatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum rumusannya dalam peraturan perundang- undangan.
- 2) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Asas tersebut merupakan asas yang paling esensial dalam suatu tindak pidana, karena tanpa adanya ketentuan hukum pidana terdahulu yang mengatur mengenai segala hal yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan maka tidaklah diketahui adanya suatu tindak pidana.

Dalam penjelasan sebelumnya telah dijelaskan definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2015) hlm. 59-61.

²⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2014) hlm. 35.

²⁷ Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Hukum Pidana*, (Jakarta; Diadit Media Press, 2015), Hlm. 2.

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu persoalan terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP.²⁸

3. Jenis-jenis tindak pidana

Membagi suatu kelompok atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. Berikut adalah beberapa jenis tindak pidana, yaitu:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan

pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*ommission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²⁹

Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya keharusan untuk memiliki SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor, dan tidak menyangkut dengan masalah keadilan.

²⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2007), hlm. 50-51

b. Delik Formal (formil) dan Delik Material (Materiil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalialia (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah pasal 362 (pencurian), pasal 160 (penghasutan) dan pasal 209-210 (penyuapan).

Dalam delik material titik beratnya pada pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi bagaimana melakukan perbuatan itu tidak mrnjadi masalah. Contohnya adalah pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh ngan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

c. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas...dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti...diketahuinya, dan sebagainya.

Delik culpa didalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata...karena kealpaannya. Didalam beberapa terjemahan kadang kadang dipakai istilah...karena kesalahannya.

d. Delik Commissionis dan Delik Ommissionis

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif atau positif, sesuai dengan rumusan delik yang mensyaratkannya, delik yang seperti itu dinamakan delik commissionis (*delictum comissionis*).³⁰ Delik commissionis barangkali tidak terlalu sulit dipahami misalnya berbuat mengmbil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya.

²⁹ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2016) hlm. 11-12

Ada pula ketentuan undang-undang yang mensyaratkan ketentuan pasif atau negatif yang diwujudkan dengan mengabaikan apa yang diperintahkan oleh undang-undang untuk dilakukan yang dinamakan delik omissionis (*delictum omissionis*).³¹ Delik omissionis dapat kita jumpai pada pasal 522 (tidak datang ke pengadilan sebagai saksi), pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).³² Menurut Andi Hamzah, delik omisi dibedakan antara delik omisi murni dan delik omisi yang tidak murni. Delik omisi murni ialah membiarkan sesuatu yang diperintahkan sedangkan delik omisi yang tidak murni disebut *delicta comissionis per omissionem*, delik ini terjadi jika dalam undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat tersebut dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian).³³

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Terjadi Terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, di sebut juga dengan *aflopende delicten*. Delik ini juga biasa disebut sebagai delik selesai, yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, maka tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus yang disebut juga dengan *voortdurende delicten* tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang, misalnya pada pasal: 329, 330, 331, 333, 334, kejahatan ini berlangsung lama tidak berakhir seketika.

³⁰ Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.* hlm. 236.

³¹ *Ibid.*,

f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana umum yang dimuat di dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil. (Buku II dan Buku III KUHP). Menurut Andi Hamzah, Tindak pidana umum (*ius commune*) ialah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus (*ius speciale*) ditujukan untuk orang-orang tertentu dan delik-delik tertentu saja.³⁴

Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya Tindak pidana korupsi (UU No.31 Th 1999), tindak pidana psikotropika (UU No.5 Th, 1997), tindak pidana perbankan (UU No.10 Th. 1998), tindak pidana narkoba (UU No.22 Th 1997).³⁵ Ada tiga kategori yang dapat dikualifikasikan sebagai peraturan pidana khusus, seperti;³⁶

- 1) Undang-undang yang tidak dikodifikasikan.
- 2) Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana.
- 3) Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus (*ius singular, ius speciale*) yang mengatur tentang delik-delik tentang kelompok-kelompok tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu.

Menurut Andi Hamzah, perundang-undangan pidana umum ialah KUHP beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Sedangkan perundang-undangan pidana khusus ialah semua.

³² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2007)., hlm. 57-60

³³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2014), hlm. 108.

perundang-undangan diluar KUHP beserta perundang-undangan pelengkapanya, baik perundang-undangan pidana yang bukan pidana tapi bersanksi pidana.³⁷ Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana umum merupakan segala peraturan pidana yang berlaku untuk setiap orang dan diatur dalam KUHP, sedangkan hukum pidana khusus merupakan segala peraturan pidana yang tidak diatur dalam KUHP, atau sebagai aturan pelengkap dari KUHP.

D. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Corruptio(Lt.); Corruption (Ing.) adalah suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan perekonomian negara; Perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau Negara.³⁸

Menurut John M. Echols dan Hasan Shadaly, korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk, sedangkan menurut A. I. N Kramer SR. mengartikan kata korupsi sebagai; busuk, rusak atau dapat disuap.³⁹ Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparaturnya pemerintah, penyelewengan kekuasaan jabatan karena pemberian faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan

³⁴ *Ibid*, hlm. 18.

³⁵ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 126-127

³⁶ Andi Hamzah, *Op. cit.* hlm. 19.

dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, diantaranya: (a) Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain, (b) korupsi adalah busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaanya untuk kepentingan pribadi).

Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidak jujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Berikut uraian beberapa pendapat pakar lainnya:

Menurut A.S. Hornby dan kawan-kawan, mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*The Offering and accepting of bribest*), serta kebusukan atau keburukan (*the cay*). Sedangkan menurut Dafid M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum.⁴⁰

Menurut Robert Klitgaard Korupsi menyangkut masalah penyalahgunaan instrument-instrument kebijakan seperti soal tarif, pajak, kredit, system irigasi, kebijakan perumahan, penegakkan hukum peraturan menyangkut masalah keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengambilan pinjaman, dan sebagainya. Ditegaskan pula bahwa korupsi itu dapat terjadi tidak saja disektor pemerintahan, tetapi juga di sektor swasta, bahkan sering terjadi sekaligus di kedua sektor tersebut.⁴¹

³⁷ *Ibid*, hlm. 13.

³⁸ Zulkifli & Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary of Law*, (Cetakan I ; Surabaya; Grahamedia Press, 2012), hlm. 263.

³⁹ Ermanja Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Penyelenggaraan Negara adalah penyelenggaraan Negara sebagai mana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.⁴²

2. Ciri dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

a. Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi

Syed Hussein mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu:

- a) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b) Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkingannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka
- c) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- e) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan- keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan.

⁴⁰Elwi Dani, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 4.

- g) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
- h) Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dan mereka yang melakukan tindakan itu.
- i) Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kurniawan unsur-unsur tindak pidana korupsi meliputi :⁴³

- 1) Unsur melawan hukum
- 2) Unsur menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
- 3) Unsur merugikan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung
- 4) Dilakukan oleh pejabat publik/penyelenggara Negara maupun masyarakat.

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :⁴⁴

- Pasal 2 : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.
- Pasal 3 : “Setiap orang yang dengan tujuan memperkaya diri

⁴¹*Ibid*, hlm. 4-5.

⁴²Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)*, (Cetakan II; Bandung: Citra Umbara. 2017), hlm. 59.

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

- Pasal 5 : “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.
- Pasal 6 : “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.
- Pasal 7 : “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 atau pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.
- Pasal 8 : “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.
- Pasal 9 : “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.
- Pasal 10 : “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.
- Pasal 11 : “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”

⁴³ Kurniawan,L. (et al). *Menyingkap Korupsi di Daerah*. (Jakarta; Indonesia Corruption Watch, 2003), Hlm 15.

- Pasal 12 : “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.
- Pasal 13 : “Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”.
- Pasal 14 : “Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang- undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”.
- Pasal 15 : “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”.
- Pasal 16 : “Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Sejarah Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Korupsi

Perjalanan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi bermula pada tanggal 9 Juni tahun 1960, pada saat itu ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang disebut juga “Peraturan Pemberantasan Korupsi 1960”, kemudian dengan Undang-Undang No.

1 Tahun 1961 ditetapkan menjadi undang-undang dan diberi nama “Undang-Undang Anti Korupsi”.⁴⁵

Lahirnya undang-undang tersebut kemudian dengan tegas mencabut kedua peraturan Perpu terdahulu yang hanya berlaku dua tahun. Jadi sejak saat itu hanya ada satu macam perbuatan korupsi saja, yaitu yang disebut “Tindak Pidana Korupsi” yang pengertiannya sama dengan “Perbuatan Korupsi Pidana” seperti yang dimaksudkan oleh kedua Peraturan Perpu yang dicabut tersebut.⁴⁶ Hal yang baru dalam undang-undang tersebut adalah ditariknya beberapa pasal dari KUHP kedalam undang-undang tersebut, menjadi satu jenis tindak pidana korupsi dan diberi ancaman hukuman yang berat yaitu dua belas tahun penjara dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.

Baru kemudian setelah bangkitnya orde baru, maka dari sekian banyak masalah yang mendapat perhatian adalah masalah korupsi. Pada saat itu, mulai timbul suara-suara tentang korupsi. Setiap mata seolah melihat merajalelanya tindak pidana korupsi, setiap hidung mencium busuknya bau korupsi, dan setiap orang merasakan akibat dari korupsi yang menyesak dada. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah kemudian berpendapat bahwa perlu diadakan pembaharuan undang-

⁴⁵ K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 31.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 32.

undang tentang tindak pidana korupsi, karena undang-undang yang lama tidak lagi sejalan dengan realita dan kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Dan pada tanggal 19 Maret 1971 maka diundangkanlah undang-undang yang terdiri dari 37 pasal, yang diberi nama Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.⁴⁷

Kemudian pada tanggal 19 Mei tahun 1999, disahkan Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Namun tidak lama setelah itu, diadakan kembali pembaharuan mengenai tindak pidana korupsi, maka dengan segala pertimbangan lahirlah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut terdiri dari 45 pasal yang disepakati dan disahkan dan ditetapkan. Kemudian untuk menunjang undang-undang yang baru diterbitkan pada saat itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu.⁴⁸

Seiring dengan berjalannya waktu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari 45 pasal, dianggap sudah tidak sesuai dan relevan lagi dengan berkembangnya praktik tindak pidana korupsi di Indonesia, maka dengan itu lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 35-36.

⁴⁸ Sudikno Metokusumo. Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Sejak Tahun 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 52.

Tindak Pidana Korupsi yang ditetapkan pada tanggal 21 November Tahun 2001.⁴⁹

Pada tahun 2003, dengan segala pertimbangan atas situasi, kondisi, dan toleransi Bangsa Indonesia pada saat itu merasa pengaturan mengenai pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi belum juga optimal. Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, berkesinambungan dan intensif, karena korupsi telah banyak merugikan keuangan Negara, menghambat pertumbuhan perekonomian Negara, dan menghambat pembangunan Bangsa Indonesia. Maka dengan segala pertimbangan disahkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian untuk memperkuat landasan yuridis dalam hal pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi maka lahirilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption 2003* atau lebih dikenal dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.

Adapun peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang memiliki hubungan erat dengan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁹ *Ibid.*,

- d. Ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam KUHP ditemui pengaturannya di beberapa pasal pada tiga bab, yaitu: - Bab VIII menyangkut kejahatan terhadap penguasa umum, yakni pada Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP -Bab XXI tentang perbuatan curang, yakni pada Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP. -Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan, yakni Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP.
- e. Peraturan terkait lainnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Kejaksaan Negeri Palopo Sulawesi Selatan. Karenapenulis menemukan kasus yang berhubungan langsung dengan judul penulis danmenganggap bahwa lokasi tersebut dekat dari rumah peneliti sehingga memudahkan proses penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan objek yang diteliti.⁵⁰ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi.

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui peranan intelejen kejaksaan negeri Palopo dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Pendekatan di atas digunakan karena penelitian ini membutuhkan jasa beberapa paradigma keilmuan tersebut. Pendekatan itu diharapkan mampu mengungkap berbagai macam hal sesuai dengan objek penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.⁵¹

⁵⁰Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 66.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kota Palopo. Informan dalam penelitian ini ialah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palopo, Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo, dan pihak yang terkait dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau melalui orang lain.⁵²Data sekunder dapat diperoleh melalui dokumentasi terkait dengan sejarah berdirinya Kejaksaan Negeri Palopo, visi dan misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif, di mana peneliti ikut langsung terlibat dalam proses pelaksanaan dan pengamatan dugaan tindak pidana korupsi.

⁵¹Etta Mamang Sangadji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta; Andi Offset, 2010), hlm. 170.

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* (Cet. XII; Bandung; Alfabeta, 2011), hlm. 137.

2. Wawancara

Penulis melakukan Wawancara untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari pihak-pihak yang dianggap terkait dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dalam hal ini kegiatan penulis mengumpulkan dukumen/arsip yang mendukung proses penelitian di Kejaksaan Negeri Palopo.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen artinya sesuatu yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu.⁵³

Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri atau *human instrument*, yaitu peneliti sendiri yang menjadi instrumen.⁵⁴ Kemudian peneliti mengembangkan instrumen tersebut menjadi wawancara, observasi dan dokumentasi.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dari lapangan diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses pengolahannya melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.⁵⁵ Data tersebut baik berasal dari hasil observasi, wawancara secara mendalam maupun dari hasil dokumentasi.

⁵³M. Dahlan Y. al-Barry dan L. Lya Sofyah Yacob, *Kamus Induk Ilmiah Seri Intelektual* (Cet. I; Surabaya; Target Press, 2003), hlm. 321.

⁵⁴*Human Instrument* berfungsi menetapkan focus peneliti, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya, Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 305-306.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penelaan dan penyusunan secara sistematis semua catatan lapangan hasil pengamatan, transkrip wawancara, dan bahan-bahan lainnya yang dihimpun untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai data tersebut dan mengkomunikasikan apa yang telah ditemukan dari penelitian.⁵⁶

G. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian ilmiah adalah suatu penelitian yang menuntut prosedur ilmiah, sehingga kesimpulan yang diperoleh betul-betul objektif dan tepat. Tujuan dari pengabsahan data ialah untuk mengukur validitas hasil penelitian yang dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dalam penelitian,⁵⁷ yakni melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan .



⁵⁵ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 337.

⁵⁶ Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research in Education; an Introduction to Theory and Methods* (Boston; Allyn and Bacon, 1998), hlm. 157.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, hlm. 272.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Palopo

Kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang. Dalam kapasitasnya sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan dilengkapi dengan seksi Intelijen yang bertugas untuk menjalankan fungsi ini terutama dalam hal pengumpulan data dan bahan keterangan. Intelijen Kejaksaan mempunyai tugas menyediakan atau memberikan data, informasi atau bahan keterangan kepada Pimpinan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan tindakan serta membuat perencanaan kegiatan selanjutnya.⁵⁸

Sebelum membahas tentang peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, maka terlebih dahulu disajikan mengenai gambaran umum tentang Kejaksaan Negeri Palopo, yaitu:

1. Deskripsi tentang Kejaksaan Negeri Palopo

Kejaksaan Negeri Palopo (Kejari Palopo) secara struktural terletak dibawah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) dan Kejaksaan Agung RI yang berada di Ibu Kota Negara, dengan luas wilayah mencapai 145,73 kilometer persegi, jumlah penduduk mencapai lebih dari 1.707.767 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 11.719 per kilometer persegi dan kantor Kejaksaan Negeri Palopo terletak di Jl. Batara No. 11, Palopo.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Amri Kurniawan SH.,MH Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo, Hari Selasa, 24 desember 2019.

2. Fungsi sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo

Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No : PER-037/A/J.A/2001 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia yaitu melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan alat bukti tentang benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana korupsi yang selanjutnya bukti tersebut diserahkan kepada Pimpinan atau pihak yang berkepentingan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya akan akan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya;
- c. Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan karya di lingkungan kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- d. Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan

memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.

Secara lebih khusus berdasarkan hasil wawancara dengan Amri Kurniawan SH.,MH pada Kejaksaan Negeri Palopo, seksi intelijen bertugas:

- a. Melakukan kegiatan penyelidikan sejak dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyelidikan. Seksi intelijen dalam hal penyelidikan tindak pidana terutama tindak pidana khusus bertugas untuk mencari data, informasi atau bahan keterangan mengenai benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana.
- b. Pengamanan/pengawasan yang dilakukan oleh intelijen seperti melakukan pengamanan barang bukti agar tidak hilang, melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan, pengawasan terhadap media massa dan barang cetakan, pengawasan orang asing dan cegah tangkal, serta melakukan pengawasan penjagaan keamanan dan ketertiban umum.
- c. Penggalangan merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tindakan yang bertujuan untuk mengubah suatu sikap dengan tujuan mengubah tingkah laku secara sukarela.

Dalam seksi Intelijen Kejaksaan juga terdapat subseksi diantaranya yakni :

- a. Subseksi Sosial dan Politik

Subseksi Sosial dan Politik mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta

mendukung operasi yustisial mengenai masalah ideologi dan soial politik, media massa, barang cetakan, orang asing, cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan dan keamanan, tindak pidana perbatasan dan pelanggaran wilayah perairan, aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, lingkungan hidup, penyuluhan hukum serta penanggulangan tindak pidana umum dan narkoba.

b. Subseksi Ekonomi dan Moneter

Subseksi Ekonomi dan Moneter mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi mengenai masalah investasi, produksi, distribusi, keuangan, perbankan, sumber daya alam dan pertanahan, penanggulangan tindak pidana ekonomi, korupsi serta pelanggaran zona eksklusif.

c. Subseksi Produksi dan sarana Intelijen

Subseksi Produksi dan Sarana Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang produksi berupa laporan berkala, insidentil dan perkiraan keadaan pembinaan aparat intelijen terhadap kemampuan dan integritas aparat intelijen di lingkungan Kejaksaan Negeri dan meyelenggarakan administrasi intelijen, penyiapan dan pemberian penerangan serta publikasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan.

3. Langkah-Langkah yang Dilakukan Oleh Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Amri Kurniawan SH.,MH pemberantasan tindak pidana korupsi melalui upaya

penindakan berupa kegiatan operasi intelijen yustisial (penyelidikan) oleh jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo bahwa Segera setelah seksi intelijen mendapatkan informasi (laporan masyarakat, pengaduan masyarakat, atau temuan sendiri) tentang adanya suatu indikasi tindak pidana korupsi, maka informasi tersebut disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palopo. Kajari kemudian mendisposisi surat tersebut kepada Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) dengan permintaan untuk dibuat telaahan.

Telaah intelijen ini memuat pokok permasalahan, uraian permasalahan, telaahan, kesimpulan, dan saran tindak. Bilamana informasi yang diperoleh tersebut dirasa belum lengkap, maka dalam saran tindak penelaah mengajukan saran kepada pimpinan untuk diterbitkan Surat Perintah Tugas. Apabila dalam telaahan intelijen, penelaah berkeyakinan bahwa informasi terkait adanya dugaan tindak pidana tersebut besar kemungkinannya memang terjadi (informasi A1), maka penelaah memberikan saran tindak kepada pimpinan agar informasi tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan penyelidikan intelijen.

Dalam tahap penyelidikan terbuka ini dipanggilah calon saksi, calon tersangka. Panggilan ini hanya bersifat undangan saja, sehingga calon saksi maupun calon tersangka berhak menerima ataupun menolak untuk hadir ke Kejaksaan. Kemungkinan dari para calon tersangka yang kooperatif akan mau menunjukkan bukti-bukti yang diminta bagian intel dan memberikan keterangan untuk membuktikan kelegalan tindakannya. Calon tersangka yang tidak kooperatif biasanya akan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan bersifat tertutup, sehingga kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan Intelijen Kejaksaan akan kebenaran tuduhan yang secara lebih detail Kasi Intel pada Kejari Palopo mengatakan bahwa dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan Intelijen Kejaksaan membagi ke dalam beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk merumuskan kebutuhan dari keinginan Pimpinan Kejaksaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok di lapangan untuk memberikan pengarah kegiatan intelijen, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan sistematis guna mendapatkan hasil yang maksimal. Tahap perencanaan dilakukan oleh Intelijen setelah menerima petunjuk atau perintah dari Pimpinan Kejaksaan. Tahap ini sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.

b. Tahap Pengumpulan Keterangan

Setelah menyiapkan perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, selanjutnya Intelijen melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan. Dalam proses pengumpulan keterangan Intelijen Kejaksaan harus melengkapi data-data yang diperlukan dalam melakukan tahap selanjutnya. Penyelidikan pada tahap ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data, keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan. Teknik pengumpulan data biasanya dilakukan dengan metode observasi (pengamatan) di lapangan, sedangkan teknik pengumpulan bahan keterangan dilakukan dengan cara memintai keterangan atau mengadakan wawancara dengan seseorang.

Penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi Intelijen Kejaksaan biasanya menggunakan teknik penyelidikan secara terbuka maupun secara tertutup, adapun teknik penyelidikan secara terbuka maupun tertutup adalah sebagai berikut:

1) Penyelidikan secara Terbuka

a) Wawancara

Wawancara ini diadakan melalui teknik Tanya jawab seputar permasalahan yang ingin diketahui oleh Intelijen Kejaksaan dengan memberikan pertanyaan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

b) Elisitasi

Elisitasi adalah kegiatan dengan teknik melemparkan pertanyaan yang bersifat memancing yang tanpa disadari oleh obyek, elisitasi ini biasanya digabung dengan cara wawancara yang tanpa disadari oleh pihak yang sedang diajak bicara.

c) Observasi

Cara yang dilakukan Intelijen Kejaksaan dalam observasi adalah dengan caraterjun langsung kelapangan untuk melakukan peninjauan dan pengamatan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

d) Pemotretan

Dalam tahap pemotretan cara yang digunakan adalah memotret atau mengambil obyek gambar yang ada dilapangan, terutama sasaran yang diinginkan. Biasanya pemotretan ini digunakan Intelijen Kejaksaan untuk mengetahui aset berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

2) Penyelidikan secara Tertutup

a) Sensor

Kegiatan sensor dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penelitian, menyeleksi, menyortir berita, dokumen atau orang yang dicurigai turut membantu pelaku dalam

mengalirkan dana hasil dari tindak pidana korupsi untuk membatasi ruang gerak orang tersebut.

b) Penyadapan

Kegiatan penyadapan dilakukan dengan caramendengarkan percakapan dari pelaku atau orang-orang yang dicurigai turut membantu pelaku dalam melakukan tindak pidana uang melalui alat komunikasi.

c) Tanam Jaring

Tanam jaring dilakukan dengan cara menanam, meletakkan orang atau agen yang diberi kepercayaan untuk mencari data atau informasi yang diperlukan. Dalam hal ini Intelijen Kejaksaan harus mencari orang yang dapat dipercayai agar data atau informasi didapatkan dengan fakta yang ada sesuai dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dialami.

d) Pelacakan Aset

Intelijen Kejaksaan harus mencari orang yang dapat dipercayai agar data atau informasi didapatkan dengan fakta yang ada sesuai dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dialami. Kemudian setelah dikumpulkan data akurat yang cukup dari penyelidikan tertutup maka diadakan pra ekspose di kejaksaan sebelum menuju ke penyelidikan terbuka.

e) Tahap Pengolahan

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan pengolahan dari hasil pengumpulan data dan keterangan yang telah dilakukan oleh Satuan Intelijen Kejaksaan. Setelah segala sesuatunya dipandang cukup, maka dalam jangka waktu paling lama 7 hari setelah berakhirnya surat perintah, Tim

Pelaksana Intelijen (Tim Penyelidik) menyusun dan membuat Laporan Operasi Intelijen Yustisial. Dalam hal ini bahan keterangan yang telah diterima akan diolah melalui proses pencatatan, penilaian dan penafsiran, sehingga bahan keterangan yang awalnya masih merupakan bahan mentah akan diolah menjadi data yang berguna bagi Kejaksan dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Proses pengolahan bahan keterangan menjadi intelijen dilakukan secara terus menerus melalui kegiatan pencatatan, penilaian dan penafsiran. Pencatatan merupakan kegiatan pencatatan secara sistematis yang berupa tulisan atau gambar agar memudahkan dalam kegiatan penilaian dan penafsiran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan:

- i. Mudah untuk dicatat (dikelompokkan berdasarkan bidang dan masalahnya)
- ii. Sederhana, mudah dimengerti
- iii. Memungkinkan kecepatan dalam pekerjaan penyusunan
- iv. Penyajian keterangan-keterangan yang diperlukan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi
- v. Memudahkan pelaksanaan penilaian dan penafsiran
- vi. Memudahkan dan menjamin kecepatan mempersiapkan laporan

Adapun penilaian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara beriringan atau bersamaan dengan kegiatan pencatatan. Kegiatan ini dilakukan dengan menilai suatu bahan keterangan secara kritis, yang akan digunakan sebagai dasar kegiatan penafsiran. Penilaian adalah menentukan tingkat kebenaran bahan keterangan dan tingkat kepercayaan sumber bahan

keterangan.

Sedangkan penafsiran merupakan proses transformasi bahan keterangan menjadi intelijen dengan cara mencocokkan dan membandingkan keterangan yang satu dengan yang lainnya. Disamping itu penafsiran juga merupakan pertimbangan yang kritis terhadap keterangan melalui analisa, integrasi dan penentuan kesimpulan.

- i. Analisa merupakan suatu proses pemilihan dan penyaringan bahan keterangan yang telah dinilai baik sumber maupun isinya serta memisahkan dari bahan keterangan lain berdasarkan kepentingan tugas pokok. Proses analisa harus dapat mengintegrasikan antara intelijen dasar dan intelijen aktual dalam rangka menentukan intelijen ramalan. Dalam penganalisaan perlu mempedomani hal-hal antara lain:
 - Kelengkapan informasi/bahan keterangan. Semakin lengkap informasi/keterangan yang diperoleh akan lebih memudahkan dalam menganalisa suatu masalah.
 - Memenuhi target operasi. Dalam penganalisaan bahan keterangan/informasi harus relevan dengan Target Operasi yang diterima, sehingga tidak menyimpang dengan Target Operasi yang diterima.
 - Bahan Keterangan yang aktual. Hal ini akan berpengaruh terhadap proses analisa sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang tepat.
 - Faktor-faktor yang berpengaruh seperti kemampuan dan pengalaman petugas, waktu yang tersedia, bahan keterangan yang diperoleh, serta sarana dan prasarana yang tersedia.
- ii. Integrasi merupakan kegiatan mengkompilasikan keterangan yang dipisahkan pada waktu melakukan analisis dan menghimpunnya dengan keterangan-keterangan lain yang sudah diketahui untuk membentuk suatu gambaran yang logis atau

hipotetis tentang suatu masalah. Langkah tersebut antara lain:

- Memadukan beberapa bahan keterangan sesuai Target Operasi. Hal ini perlu dilaksanakan untuk melengkapi atau memperkuat antara keterangan yang satu dengan yang lainnya. Apabila ada suatu bahan keterangan yang tidak mendukung tugas pokok, keterangan tersebut dapat diabaikan.
- Mengolah bahan keterangan yang diperoleh dengan intelijen dasar yang tersedia. Bahan keterangan yang diperoleh selanjutnya diolah dan diperbandingkan dengan intelijen dasar yang tersedia sehingga keduanya dapat saling memperkuat/mendukung atau tidak saling mendukung.
- Pembuatan intelijen ramalan. Merupakan kegiatan pembuatan perkiraan yang akan terjadi dengan cara mentransformasikan intelijen dasar, intelijen aktual dan kecenderungan situasi yang ada secara tepat dan benar, sehingga dapat diprediksi kemungkinan yang akan terjadi dalam bentuk intelijen ramalan.
- Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penafsiran keterangan, adalah mengambil kesimpulan dari hipotesis-hipotesis yang dikembangkan. Kesimpulan mencakup tafsiran atau interpretasi dari suatu keterangan. Kesimpulan ini selanjutnya dijadikan dasar membuat perkiraan mengenai kemungkinan perkembangan situasi yang akan dihadapi. Perkiraan tersebut jelas hanya merupakan hipotesis yang disampaikan kepada pihak pimpinan/atasan.

f) Tahap Penyampaian dan Penggunaan

Tahap penyampaian dan penggunaan merupakan tahap atau langkah akhir dari tahapan pengumpulan data intelijen, pada tahap ini merupakan lanjutan dari langkah pengolahan data yang telah disusun dalam bentuk produk Intelijen untuk di sampaikan kepada

pengguna. Bagaimanapun baiknya produk Intelijen yang telah disusun dan disiapkan tidak akan ada artinya apabila tidak dapat digunakan oleh pengguna. Oleh sebab itu dalam tahap ini, agar dapat dipergunakan maka produk intelijen yang telah disusun harus tepat waktu dan dapat menjawab tuntutan tugas.

Pada tahap ini, ketua tim pelaksana intelijen melalui Kasi Intel menyampaikan Lapopsinsus kepada user (Kajari) dengan Nota Dinas. Laporan operasi intelijen yustisial tersebut diserahkan dengan dilampiri Matrik Hasil Operasi Intelijen Yustisial. Setelah Kepala Kejaksaan Negeri Palopo membaca, mempelajari, dan mencermati isi laporan tersebut berpendapat perlu untuk dilakukan ekspos, maka pelaksana intelijen menyiapkan bahan ekspos dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah menerima petunjuk/disposisi dari Kajari.

Setelah operasi intelijen yang telah dilaksanakan mendapatkan suatu kesimpulan, selanjutnya Kajari memerintahkan Kasi Intel untuk membuat laporan ke Kejaksaan Tinggi SulSel dalam bentuk Laporan Intelijen Khusus. Biasanya, untuk kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat dan/atau menyangkut kerugian negara yang besar dan/atau memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi, maka Kejaksaan Tinggi SulSel meminta kepada Pelaksana Intelijen agar melakukan gelar perkara (ekspos) di Kejati, dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil gelar perkara (ekspos) di Kejati tersebut yang kemudian digunakan sebagai dasar oleh Pelaksana Intelijen dalam menentukan hasil akhir kegiatan operasi intelijen (penyelidikan).

Dalam hal kesimpulan yang diambil adalah “ditingkatkan ke tahap penyidikan”, maka Kasi Intel akan melimpahkan penanganan perkara tersebut ke seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) disertai dengan berita acara. Dengan dilimpahkannya penanganan perkara ke Seksi Pidsus, maka tugas dan tanggung

jawab pelaksana intelijen dalam kegiatan operasi intelijen (penyelidikan) berakhir sudah.

g) Evaluasi Akhir

Diperlukannya evaluasi akhir adalah untuk mengetahui sejauh mana hambatan-hambatan yang dialami dilapangan dari rangkaian proses intelijen tersebut. Evaluasi berkaitan dengan penilaian atas proses berulang dimulai dari tahap perencanaan, pengumpulan keterangan, pengolahan keterangan, penyampaian dan penggunaan untuk mendapatkan intelijen yang berkaitan dengan ancaman dan atau peluang ancaman.

Terkait dengan peran intelijen, menurut Amri Kurniawan SH.,MH, selain melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi juga berperan dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi sehingga dibentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). pencegahan ini dilaksanakan oleh seksi intelijen Kejaksaan Negeri Palopo dengan mengawal dan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Apabila ada hal yang memungkinkan akan terjadi tindak pidana terutama tindak pidana korupsi maka intelijen menyampaikan pendapat/pandangan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan yang disampaikan oleh narasumber, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara serta adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Intelijen memiliki menyelenggarakan fungsi

penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Dalam penanganan perkara tindak pidana khusus terutama tindak pidana korupsi, Kejaksaan diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan. Penyelidikan dilaksanakan oleh Seksi Intelijen dan penyidikan dilaksanakan oleh Seksi Pidana Khusus.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Dalam setiap pengungkapan tindak pidana sering ditemukan hambatan atau permasalahan. Termasuk Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo memiliki hambatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai hambatan-hambatan apa saja yang sebenarnya terjadi dalam hal peranan bagi Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

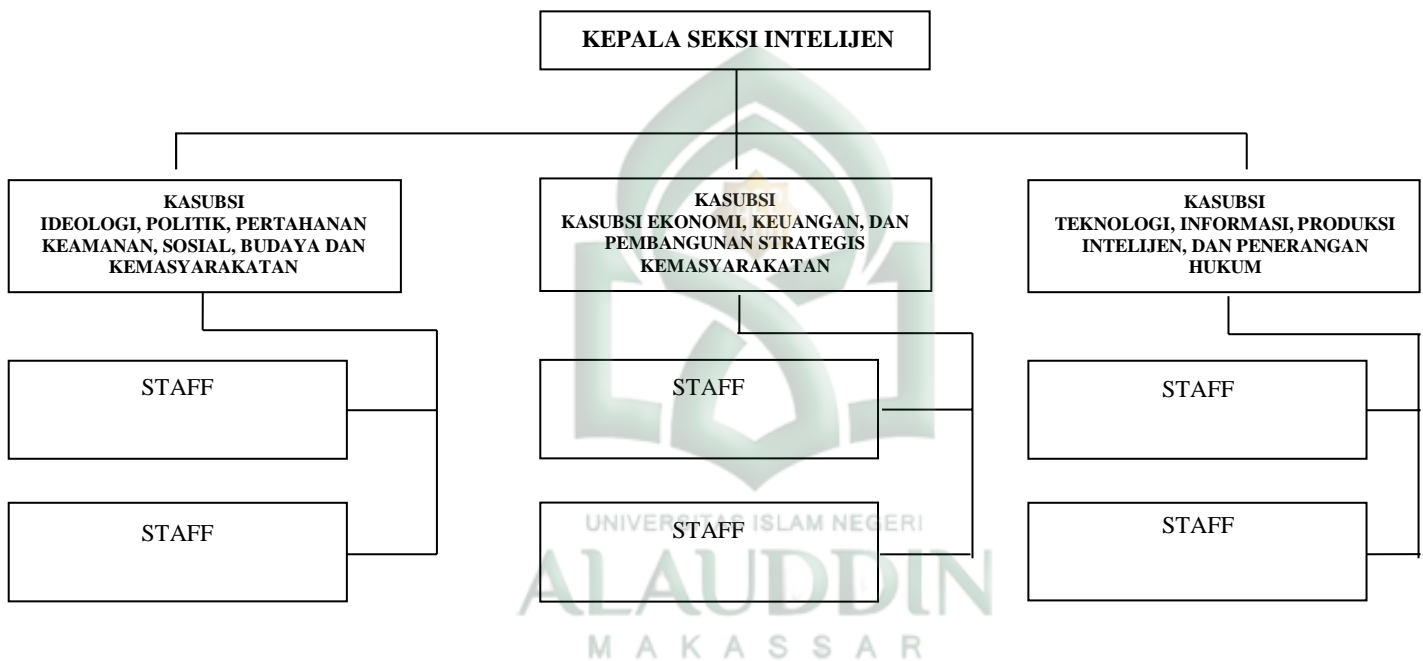
1. Sarana dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini minimnya SDM yang dimiliki Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo baik secara kuantitatif. Secara kuantitatif SDM masih kurang sementara untuk menjalankan tugas seksi intelijen diperlukan SDM yang lebih mengingat tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime*. Seringkali jadwal pemeriksaan (permintaan keterangan) berbenturan dengan jadwal sidang para Jaksa (anggota tim penyelidik).

Sedangkan secara kualitatif SDM pada Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo juga masih perlu ditingkatkan mengingat faktor sumber SDM merupakan komponen yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan/suksesnya suatu pekerjaan, dalam konteksitas dukungan sumber daya manusia intelijen dalam pelaksanaan tugas dalam mendukung supporting data terhadap bidang pidana khusus dirasa masih kurang

mempunyai akses yang signifikan, selain masih bersifat menunggu dalam arti masih belum bersifat pro aktif terhadap permasalahan atau kurang mempunyai kepekaan sebagai aparat intelijen.

Adapun terkait struktur seksi intelijen di Kejaksaan Negeri Palopo adalah sebagai berikut :



Kurangnya personal yang mumpuni dan menguasai ilmu intelijen, dengan kata lain aparaturnya intelijen masih belum memenuhi standar kompetisi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen, disamping dukungan teknis terhadap pelaksanaan tugas intelijen untuk mendukung bidang pidana khusus belum terpola dengan baik yang diinginkan (baru dilakukan secara insidental). Selain itu peralatan intelijen pada Kejaksaan Negeri Palopo juga belum dilengkapi dengan fasilitas yang canggih seperti alat untuk mendeteksi apakah sebuah dokumen dipalsukan atau tidak, alat untuk mengetahui apakah seseorang dalam memberikan keterangan benar atau tidak. Hal ini tentu mendatangkan kesulitan bagi pihak Intelijen Kejaksaan dalam memperoleh bukti-bukti berupa surat, dokumen-dokumen berharga, maupun tentang aset-aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

2. Sistem Birokrasi yang Lambat

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menjadi tidak leluasa atau terhambat untuk maju. Dalam pemeriksaan rekening tersangka yang harus meminta izin terlebih dahulu kepada Gubernur Bank Indonesia karena sifatnya rahasia ini sungguh-sungguh menyulitkan bagi Kejaksaan.

3. Modus Operandi yang Canggih

Kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan yang diduga sebagai Tindak Pidana Korupsi itu sangat sulit dideteksi atau dilacak kapan dilakukan atau usai dilaksanakan oleh pelaku karena begitu rapi, begitu sempurna cara-cara yang ditempuh, baik melalui pertanggungjawaban, pembukuan, atau pekerjaan fisik, dan sebagainya, sehingga aparat pengawas yang berwenang dapat dengan mudah dikelabui, ditambah dengan alat-alat yang digunakan misalnya media elektronik seperti komputer dan internet. Apalagi modus operandi korupsi yang biasanya rapi didukung intelektualitas calon tersangka dan orang-orang disekitar yang melindunginya.

4. Faktor minimnya alokasi dana

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan pasti membutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan alokasi dana yang dimiliki oleh Intelijen Kejaksaan terbatas dan di rasa belum mencukupi untuk mendukung tugas dan fungsi Intelijen Kejaksaan tersebut. Apalagi dalam hal penyelidikan secara tertutup dan pengadaan alat yang dibutuhkan Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap suatu tindak pidana yang sedang di tangani mengingat tindak pidana korupsi ini merupakan kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dengan modus atau tipologi yang semakin hari semakin canggih. Terbatasnya anggaran dana yang diberikan kepada Kejaksaan Negeri Palopo dapat dirasakan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi karena banyaknya kasus yang perlu diselesaikan oleh Intelijen Kejaksaan sementara dananya sangat terbatas sehingga hal itu menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut telah dilakukan beberapa upaya, diantaranya:

1. Jadwal pemeriksaan (permintaan keterangan) disusun saling menyesuaikan dengan jadwal sidang para jaksa sehingga keduanya tidak berbenturan;
2. Mengoptimalkan personil intelijen yang ada;
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia;
4. Meningkatkan sumber daya manusia personil intelijen dengan cara mengikutsertakan personil dalam berbagai kegiatan seminar *in house training*, workshop, dan diklat;
5. Menambah alokasi anggaran untuk kegiatan Intelijen guna kepentingan penyidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan bukti tentang benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana korupsi yang selanjutnya bukti tersebut diserahkan ke Pimpinan atau pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Selain berperan dalam hal penyelidikan Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo juga berperan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang disebut Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
2. Hambatan yang dihadapi Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo, sistem birokrasi yang lambat, terbatasnya sarana dan prasarana, modus operandi kejahatan yang semakin canggih serta terbatasnya anggaran dana yang diberikan sementara banyak perkara yang harus ditangani.

B. Saran

1. Peranan Satuan Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo dalam Pengungkapan Duagaan Tindak Pidana Korupsi kurang maksimal, masih harus ditingkatkan lagi kinerjanya untuk mencari informasi agar tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Palopo dapat dicegah. Oleh sebab itu, diharapkan pihak Kejaksaan agar segera menindaklanjuti semua laporan informasi atau bahan keterangan yang diberikan oleh Satuan

Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau mengenai tindak pidana korupsi.

2. Dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar agar menambah jumlah anggota dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi sehingga dapat ditangani dengan cepat karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan seksi intelijen sementara jumlah SDM masih kurang.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Rajawali Pers)
- Agus Susanto, “Peran Intelejen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi 2011 di Kejaksaan Negeri Karanganyar”, (Skripsi; Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013).
- A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif
- Bambang Waluyo, Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice, (Cetakan ke-1; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016),
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Semarang: CV. Ananta, 1994).
- Elwi Dani, Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014),
- Ermanja Djaja, Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 170.
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995),
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004),
- M. Dahlan Y. al-Barry dan L. Lya Sofyah Yacob, Kamus Induk Ilmiah Seri Intelektual (Cet. I; Surabaya: Target Press, 2003),
- Penjelasan Aturan Peralihan UUD 1945, Rumusan Perubahan: ATURAN PERALIHAN pasal I, II, III, IV, menjadi I, II, III.
- Prayudi Guse, Panduan Lengkap Hukum Pidana & Perdata,
- Risky Nur Amalia. “Peranan Intelejen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan Negeri Makassar) (Skripsi, Fakultas Hukum Unhas Makassar, 2016).

Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research in Education; an Introduction to Theory and Methods* (Boston; Allyn and Bacon, 1998)

Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. (Wacana Intektual, 2007).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* (Cet. XII; Bandung: Alfabeta, 2011),

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2007).

Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)*, (Cetakan II; Bandung: Citra Umbara. 2017),

Y. Wahyu Saronto, *Intelijen (teori intelijan dan pembangunan jaringan)*, (Jogjakarta: CV Andi Offset, 2018).

Zulkifli & Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary of Law*, (Cetakan I ; Surabaya: Grahamedia Press, 2012).



Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

